



KADIN *NEWS*

VOL. 7 | FEBRUARI 2024



Entaskan Stunting:

Kadin Indonesia dan Kemenkes Teken Kerja Sama
Peningkatan Kesehatan Masyarakat

**Rapat Dewan Pengurus
Harian Kadin Indonesia:**
Rumuskan Program Strategis
Sepanjang Tahun 2024

Pemilu 2024:
Kadin Indonesia Memandang
dengan Optimisme Stabilitas
Politik dan Pertumbuhan
Ekonomi

Special Section:
Posisi Pengusaha Terhadap
Quick Count Pemilu

**Opini Pengurus
Kadin Indonesia:**
R. M. Tedy Aliudin
Kepala Badan Pengembangan
UMKM & Koperasi Kadin Indonesia

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia	FGD/Seminar	03
44	Manfaat Keanggotaan Kadin	Program Pengurus	04
45	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	Program Internal	09
46	Fitur Terbaru Website Kadin	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi/Media	14
47	Kabar Terkini: Pemberian Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik Diperkenalkan	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	24
50	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	Kunjungan Internasional	31
51	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	Advokasi Kebijakan	32
52	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	Special Section: Rapat Dewan Pengurus Harian	35
53	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	Special Section: Posisi Pengusaha terhadap Quick Count Pemilu	39
		Opini Pengurus Kadin Indonesia R.M. Tedy Aliudin Kepala Badan Pengembangan UMKM & Koperasi Kadin Indonesia	42

SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Rapat Dewan Pengurus Harian merupakan momentum penting untuk menyusun strategi dan program inovatif yang akan membawa Kadin Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi, khususnya menuju cita-cita bersama, Visi Indonesia Emas 2045.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi langkah-langkah Kadin Indonesia di bulan Februari ini. Pada bulan kedua di tahun 2024 ini, Kadin Indonesia bersyukur atas terselenggaranya berbagai agenda yang kami harapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Terucap syukur pula karena *newsletter* Kadin Indonesia yang kami beri nama Kadin News, berhasil tersusun dalam Volume 7.

Salah satu kegiatan yang telah kami laksanakan bulan Februari lalu adalah Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia. Rapat tersebut merupakan bukti konkret upaya Kadin Indonesia dalam memastikan organisasi menjalankan fungsinya dengan optimal melalui sinergi internal dan penguatan organisasi.

Rapat Dewan Pengurus Harian merupakan momentum penting untuk menyusun strategi dan program inovatif yang akan membawa negara menuju cita-cita bersama yakni Visi Indonesia Emas 2045. Rapat perdana bersama jajaran pengurus tersebut juga menekankan kembali kinerja Kadin Indonesia yang senantiasa berprinsip pada rasa optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini.

Dalam Kadin News edisi ini, kami juga merangkum seluruh kegiatan Kadin Indonesia yang diselenggarakan sepanjang bulan Februari 2024. Semoga melalui *newsletter* yang Bapak/Ibu dan saudara/i baca ini, seluruh maksud, tujuan, serta dampak dari penyelenggaraan program kerja Kadin Indonesia dapat diketahui dan didukung oleh pemangku kepentingan seluas-luasnya.

Akhir kata, mari kita dukung bersama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia.

Salam,

Yukki Nugrahawan Hanafi

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



FGD/SEMINAR



PROGRAM
PENGURUS



PROGRAM
INTERNAL



KEGIATAN BERSAMA
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



ADVOKASI
KEBIJAKAN



SPECIAL SECTION:
RAPAT DEWAN
PENGURUS HARIAN



SPECIAL SECTION:
POSISI PENGUSAHA TERHADAP
QUICK COUNT PEMILU



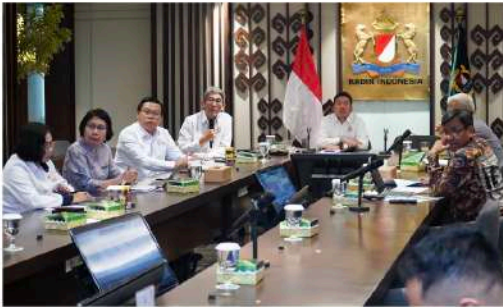
OPINI PENGURUS
KADIN INDONESIA

FGD/SEMINAR

Dorong Kemandirian Alat Kesehatan melalui TKD, Komitmen Kadin Menuju Indonesia Emas 2045



Kemandirian alat kesehatan (alkes) di Indonesia merupakan fokus utama Bidang Kesehatan Kadin Indonesia. Sepanjang 2022-2023, Bidang Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian sesi *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengusung pokok bahasan mengenai kemandirian alkes di Indonesia, yang kemudian menghasilkan rekomendasi langkah yang perlu dilakukan untuk memicu pertumbuhan kemandirian alkes dalam negeri. Rekomendasi ini terangkum dalam buku putih yang Kadin Indonesia susun dan serahkan kepada Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 yang lalu.



Guna mendukung data terkait kemandirian alkes di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI mencatat kemajuan dari aspek kemandirian alkes sepanjang tahun 2020-2023 yang salah satunya ditandai dengan jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah memiliki sertifikat TKDN di atas 50 persen pada triwulan III 2023 mencapai 2,718 produk.

Pada 26 Februari 2024, Bidang Kesehatan kembali menyelenggarakan FGD yang mengusung tema "TKDN: Pengawal Kemandirian Dalam Sistem Pengadaan Alkes". Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kesehatan, Charles Honoris, hadir mewakili Kadin Indonesia dalam FGD ini.

FGD ini bertujuan untuk membahas peran penting Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam mewujudkan kemandirian alkes di Indonesia dan dilengkapi diskusi dua arah mengenai kewajiban pengguna TKDN dalam sistem pengadaan alkes.

Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Laksono Trisnantoro, Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI Yan Sibarang Tandiele, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Kemenkes RI Zulvia Dwi Kurnaini, Lead Health Specialist The World Bank Somil Nactal, serta perwakilan himpunan alat kesehatan dan anggota Kadin Indonesia turut ambil bagian dalam FGD ini. Melalui terselenggaranya FGD ini, diharapkan dapat mendorong kemandirian produksi alkes dalam negeri dan TKDN yang menjadi salah satu instrumen kunci dalam hal ini.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Hadiri Pengukuhan Kepengurusan ALFI/ILFA Masa Bakti 2023-2028



Kadin Indonesia turut ambil bagian dalam pengukuhan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA) masa bakti 2023-2028. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan, Novie Riyanto, pada 6 Februari 2024, di kantor Kementerian Perhubungan.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, yang merupakan Ketua Umum ALFI Periode 2014-2023 berharap ALFI/ILFA dapat meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kadin di tingkat Provinsi di Indonesia. "Kolaborasi yang terjalin tersebut diharapkan dapat memperkuat industri transportasi agar dapat berkontribusi secara efisien guna mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045."

Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Novie Rianto, dalam sambutannya turut mengapresiasi kontribusi ALFI/ILFA selama ini. "Dengan kepengurusan yang baru, saya berharap ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan logistik menuju Indonesia Emas 2045 serta mewujudkan ekonomi bisnis yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global," ujar Novie Riyanto.

ALFI/ILFA sendiri merupakan asosiasi logistik dan *forwarder* terbesar di Indonesia dengan lebih dari 3.000 anggota dan memiliki perwakilan di 34 provinsi di Indonesia. Ketua Umum ALFI/ILFA terpilih periode 2023-2038, Akbar Djohan, bertekad membawa kepengurusan dan anggota AFLI naik kelas.



PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Komitmen Persiapkan Keamanan Siber Nasional bagi Digitalisasi Dunia Usaha

Keamanan siber nasional menjadi salah satu faktor penting di era digital saat ini, tidak terkecuali pada berjalannya ekosistem bisnis di Indonesia. Selaku induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia melalui Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mendorong upaya persiapan keamanan siber nasional melalui peninjauan kemitraan strategis.

Kadin Indonesia Siapkan Pengembangan Blueprint Ekosistem Keamanan Siber Industri bersama BSSN dan AT Kearney

Dalam rangka merumuskan langkah strategis guna memperkuat sistem keamanan siber nasional khususnya terkait pengembangan *blueprint* keamanan siber, Bidang Kominfo Kadin Indonesia mengadakan pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan AT Kearney pada 20 Februari 2024.



Pertemuan ini merupakan rapat perdana dengan agenda utama merumuskan pengembangan *Blueprint* Pengembangan Industri dan Ekosistem Keamanan Siber. *Blueprint* ini nantinya diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem keamanan siber di Indonesia.



Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto dan menghasilkan beberapa *output*, seperti penekanan pentingnya pembentukan Project Management Officer oleh AT Kearney, urgensi pembentukan *joint team* oleh Deputy BSSN, serta tahap finalisasi penyusunan proposal oleh Kadin. Tersusunnya *blueprint* ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri keamanan siber di Indonesia sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Kolaborasi Kadin Indonesia dan Thales Indonesia Jelang Innovation Day 2024

Kadin Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan industri strategis di bidang pertahanan, digital, dan teknologi asal Prancis, Thales Indonesia, dalam rencana penyelenggaraan acara Innovation Day 2024. Gelaran ini bertujuan untuk mensosialisasikan program Bidang Kominfo dalam keamanan siber dengan merangkul semua kelas usaha, khususnya UMKM.

Dalam rangka membahas persiapan Innovation Day 2024, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika mengadakan rapat dengan Thales Indonesia pada 21 Februari 2024, di Menara Kadin. Pertemuan ini menyoroti kesiapan gelaran yang rencananya akan diadakan pada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk komite internal dari Bidang Kominfo untuk mengoordinasikan persiapan acara bersama Thales Indonesia. Sebagai langkah tambahan, pihak Thales Indonesia juga telah menyiapkan komite internal untuk berkoordinasi dengan Kadin dalam merancang detail materi dan konten acara.

PROGRAM PENGURUS

Rapat Perdana Pokja Digitalisasi Kadin: Soroti Tantangan Implementasi Layanan Digital

Kadin Indonesia melalui Bidang Kominfo membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Digitalisasi yang berfokus mendorong implementasi penuh dari Kadin Cipta sekaligus mendorong peningkatan sinergi serta kualitas dari seluruh layanan digital Kadin Indonesia. Pada 21 Februari 2024, Pokja Digitalisasi melaksanakan rapat perdana yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, dan dihadiri pula oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Aldi Haryoprato, serta Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Wisnu Pettalolo.



Pertemuan ini membawa beberapa fokus pembahasan, salah satunya terkait amplifikasi informasi mengenai layanan digital Kadin Indonesia, beberapa nota kesepahaman yang sudah dilakukan dengan berbagai mitra, urgensi optimalisasi *website* Kadin Indonesia agar menjadi *hub* dari seluruh layanan digital Kadin, perlunya harmonisasi nama domain dari seluruh *website* layanan digital, dan implementasi layanan perdagangan Certificate of Origin (COO).

Mapping microsite, perumusan strategi integrasi, hingga peningkatan inventaris platform digital dari seluruh bidang atau badan yang ada di Kadin Indonesia akan menjadi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pokja Digitalisasi dari pertemuan tersebut. Seluruh pihak berharap kualitas layanan digital Kadin Indonesia dapat meningkat lebih baik.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Dukung Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pencapaian Target Net Zero ke Panggung Global

Kadin Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung upaya keberlanjutan untuk mencapai emisi nol bersih. Salah satu bentuk konkret komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pertemuan *roundtable* pada 19 Februari 2024.



Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sustainability Kadin Indonesia bersama Kadin Net Zero Hub ini dihadiri oleh Ketua ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM) sekaligus Ketua Net Zero Hub Dharsono Hartono, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia sekaligus Alternate Chair ASEAN-BAC Indonesia 2023 Bernardino Vega, dan Wakil Sekretaris Jenderal Asean Economic Community (AEC) Satvinder Singh.

Salah satu hasil utama dari rapat tersebut adalah pembahasan mendalam mengenai program dari ASEAN-BAC tahun 2023 dan B20 Indonesia di tahun 2022. Hasil dari perbincangan tersebut melahirkan konsep Carbon Center of Excellence dan implementasinya, yang mencakup pembentukan ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM) dan ASEAN Net Zero Hub.

Sebagai salah satu *legacy project* dari keketuan ASEAN-BAC Indonesia 2023, pertemuan perdana AACM, dihadiri oleh lebih dari 30 institusi multisektoral dan mitra kerja sama, bertujuan untuk mendorong peningkatan pasar karbon sukarela di seluruh kawasan ASEAN. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target *net zero* di tingkat regional.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah rencana partisipasi AACM dalam acara-acara besar internasional, termasuk New York Climate Week 2024, London Climate Week 2024, dan COP 29 di Azerbaijan. Partisipasi ini menunjukkan komitmen serius ASEAN dalam menyuarakan isu-isu keberlanjutan dan *net zero* di panggung global, serta memperkuat posisinya sebagai pemangku kepentingan utama dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Melalui kolaborasi yang lebih erat, Kadin Indonesia berharap akan terciptanya langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan *net zero* di kawasan ASEAN.



PROGRAM PENGURUS

Fokus Pengembangan Industri Halal Global, Kadin Indonesia, ICHS dan BPJPH Inisiasi Kick Off Meeting Perdana



Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia merupakan salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34 persen dari pengeluaran halal global. Melihat posisi yang strategis ini, Kadin Indonesia bersama Islamic Chamber Halal Service (ICHS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar *kick off meeting* pada 26 Februari 2024 di Menara Kadin.



Meeting perdana ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ketiga pihak pada Januari lalu yang berfokus pada komitmen bersama untuk memperkuat industri halal secara global, terutama di negara-negara Islam atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Mewakili Kadin Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi industri halal global yang terus berkembang dengan nilai menjanjikan. "Ini kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi agar bisa mewujudkan cita-cita menjadi *global halal hub*. Kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen Kadin Indonesia sebagai strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar mencapai Indonesia Emas 2045", ucapnya.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan industri halal. Menurut catatan BPJPH, hingga 24 Oktober 2023 sedikitnya ada 3,9 juta produk yang sudah bersertifikat halal.

Menyambut baik kemitraan yang terjalin, CEO ICHS, Ashraf El Tanbouly, mengatakan kolaborasi yang terjalin ini merupakan upaya strategis untuk mendorong upaya membangun Industri Halal Global, dimana Indonesia menjadi salah satu pemain kunci di global.

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menekankan bahwa BPJPH telah melakukan transformasi layanan sertifikasi halal termasuk di dalamnya penguatan SDM layanan yang merata. "Kami masih terus berupaya memperkuat SDM di bidang halal dengan terus mendorong pelatihan-pelatihan Auditor Halal, Pendamping PPH, Penyelia Halal, hingga Juru Sembelih halal," ungkapnya.

Terjalannya kemitraan ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mengantarkan Indonesia menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

PROGRAM INTERNAL

Kadin Indonesia dan East Ventures Luncurkan ECOVISEA, Kalkulator Gas Rumah Kaca Berbasis Web dan Gratis

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil emisi terbesar dengan kontribusi ~1,48 GtCO₂e (gigaton karbon dioksida ekuivalen) terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan kemajuan progresif dalam mencapai target Perjanjian Paris (Paris Agreement), yaitu dengan membatasi kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050.



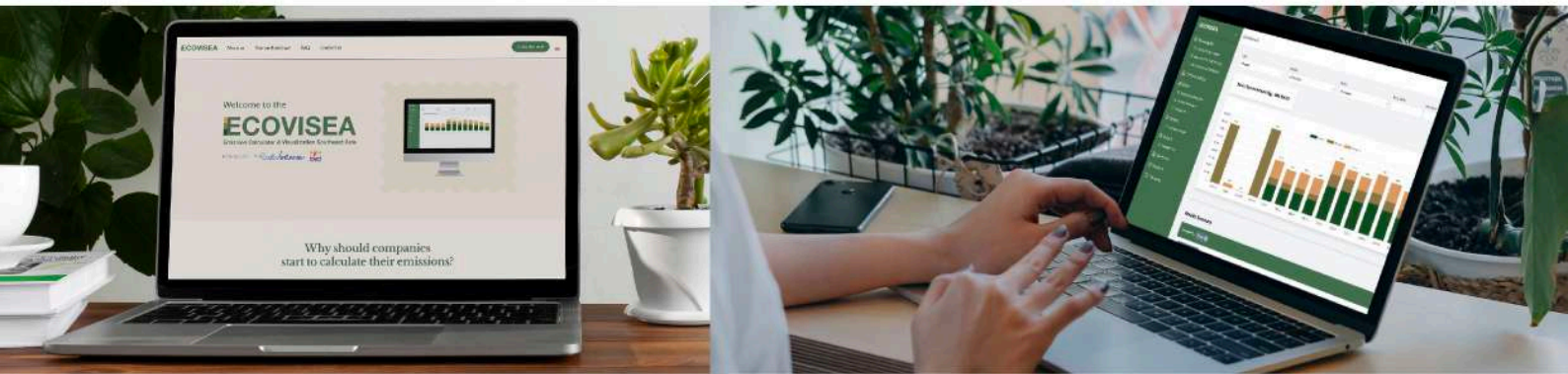
Penghitungan emisi oleh perusahaan terkait dampak lingkungan yang mereka hasilkan merupakan langkah krusial dan mendasar. Dunia usaha diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan atau membuat keputusan yang tepat untuk mencapai target keberlanjutan. Meskipun penghitungan emisi GRK bersifat krusial, banyak perusahaan di Indonesia, mulai dari usaha besar, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga *startup*, belum menghitung jejak karbonnya. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pengetahuan dan keahlian dalam menghitung emisi GRK.

Pentingnya mendorong dunia usaha pada transisi ekonomi hijau, Kadin Indonesia bersama East Ventures, dengan bimbingan dari WRI Indonesia, meluncurkan ECOVISEA - Emission Calculator & Visualization Southeast Asia (Kalkulator Emisi & Visualisasi Asia Tenggara) pada 6 Februari 2024. ECOVISEA adalah kalkulator emisi gas rumah kaca (GRK) global berbasis *web* dan dapat digunakan secara gratis oleh perusahaan untuk menghitung dan mengukur dampak lingkungannya.

Kolaborasi ini menghadirkan platform inovatif ini yang mengajak para pelaku bisnis di lintas industri untuk mengukur, mengelola, dan mengurangi emisi mereka secara akurat, sehingga memfasilitasi transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Inisiatif ini merupakan salah satu hasil dari kerja sama antara East Ventures, Kadin Indonesia (melalui program: Kadin Net Zero Hub), dan WRI Indonesia dalam memajukan komitmen menuju target emisi nol bersih (*net zero*) melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU yang ditandatangani tanggal 11 November 2022 lalu pada *breakout session* East Ventures di Indonesia Net Zero Summit 2022, yang merupakan *sideline* kegiatan B20 Indonesia.

(lanjutan di halaman 10)



"Kadin Indonesia, bekerja sama dengan East Ventures dan WRI Indonesia dengan antusias mengumumkan peluncuran ECOVISEA, sebuah kalkulator emisi gas rumah kaca berbasis web yang dapat diakses secara gratis. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami melalui Kadin Net Zero Hub untuk membantu perusahaan-perusahaan nasional dalam transisi menuju Net Zero Company. ECOVISEA merupakan platform yang esensial bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengukur dan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Kadin Indonesia meyakini bahwa ECOVISEA akan memainkan peran penting dalam memungkinkan perusahaan-perusahaan nasional secara kolektif mencapai target pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2060," kata Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia.

"Keberlanjutan telah menjadi bagian dari DNA East Ventures sejak awal berdiri. Kami senang dapat memperkenalkan ECOVISEA, sebagai alat penghitung (kalkulator) GRK berbasis web dan gratis yang dirancang untuk bisnis dan UMKM di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Diluncurkan sebagai hasil kolaborasi nyata dengan Kadin Indonesia dan WRI Indonesia, ECOVISEA merupakan bukti upaya kolaboratif dalam memanfaatkan teknologi digital, keahlian spesifik industri, dan wawasan lapangan. Platform inovatif ini menyederhanakan proses perhitungan karbon yang sebelumnya dilakukan secara manual sekaligus memberdayakan dunia usaha untuk mendapatkan visualisasi sumber emisi GRK mereka. Para pengguna pada akhirnya dapat mengidentifikasi strategi pengurangan emisi dengan lebih baik. Bersama-sama, kami bersemangat untuk membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan teknologi, dan secara aktif berkontribusi terhadap visi *net zero* yang dicanangkan pemerintah," kata Avina Sugiarto, Partner East Ventures.

Nirarta Samadhi, Country Director WRI Indonesia, mengatakan, "Kami percaya bahwa demokratisasi pengetahuan tentang penghitungan emisi yang akurat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya dekarbonisasi industri di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyederhanakan proses input data guna membantu perusahaan mengatasi tantangan dalam memperkirakan emisi mereka secara tepat karena penyajian data dan prosedur entri data sering kali rumit. Mengingat WRI Indonesia berfokus pada dekarbonisasi industri yang berbasis sains, kami senang dapat berkontribusi pada pengembangan ECOVISEA dengan memberikan panduan metodologi dan memastikan alat ini sesuai dengan GHG Protocol."



Untuk mengakses ECOVISEA,
silakan pindai QR Code di samping
atau klik tautan berikut:
ecovisea.com

PROGRAM INTERNAL

Podcast “Portcast”: Menjelajahi Dunia Logistik melalui YouTube

Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia telah meluncurkan seri penayangan Podcast “Portcast” yang dapat dinikmati melalui channel “Kadin Logistik Channel” di platform YouTube. Hingga minggu kedua Februari, sudah terdapat dua episode menarik yang menggali berbagai aspek dalam industri logistik.

Portcast diinisiasi oleh Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia dengan tujuan untuk mendalami dan membagikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek dalam industri logistik, serta memberikan platform informatif bagi para pelaku bisnis dan penggiat logistik di Indonesia.

Episode 1: “Cuan Logistik di Tahun Logistik”

Pada 7 Februari 2024, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok, Akbar Djohan, selaku *host* memperkenalkan episode pertama dari Portcast. Pada episode ini, Akbar berbincang bersama Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Liana Trisnawati. Akbar menyampaikan bahwa Portcast dihadirkan sebagai wadah diskusi bagi pengusaha, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri logistik.



Pada episode pertama yang berjudul “Cuan Logistik di Tahun Politik” ini, Akbar membahas mengenai sektor logistik yang memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan memastikan aliran barang yang efisien. Selain itu, selama tahun politik, bisnis logistik juga dapat mengalami peningkatan aktivitas karena adanya permintaan tambahan terkait kampanye dan acara politik. Namun, dampaknya bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan politik, sehingga sektor logistik tetap memainkan peran krusial sepanjang waktu.

(lanjutan di halaman 12)



Episode 2: "Logistik Pemilu, Jangan Sampai Pilu"

Pada 13 Februari 2024, Akbar kembali menjadi *host* dalam episode kedua dari Portcast. Episode ini membahas peran logistik dalam konteks pemilihan umum. Narasumber yang hadir dalam episode ini adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Yulianto Sudrajat dan Direktur Bisnis dan Logistik PT Pos Indonesia, Tonggo Marbun.



Pada episode kedua dengan judul "Logistik Pemilu, Jangan Sampai Pilu" ini, Portcast membahas sistem dan tata kelola KPU dalam pendistribusian logistik pemilu ke seluruh pelosok nusantara. Di samping itu, juga dibahas sejauh mana PT Pos Indonesia Persero terlibat dalam pengelolaan logistik pemilu, termasuk besaran anggaran yang diperlukan. Ditambah lagi, Akbar bersama para narasumber membahas mengenai perusahaan swasta turut dilibatkan dalam proses ini.

Dengan menggandeng narasumber yang kompeten dan mengangkat topik-topik relevan, Portcast menjadi sumber wawasan berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam industri logistik di Indonesia.

Saksikan terus Portcast untuk menjelajahi dunia logistik yang dinamis dan terus berkembang!



Pindai Kode QR di samping
untuk mengakses kanal  YouTube
"Kadin Logistik Channel"

PROGRAM INTERNAL

Jaring Lebih Banyak Anggota Luar Biasa (ALB), Kadin Indonesia Lakukan Kunjungan Verifikasi ke Berbagai Asosiasi

Memahami perannya sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia melalui Bidang Asosiasi dan Himpunan secara konsisten terus berupaya meningkatkan keanggotaan Anggota Luar Biasa (ALB). ALB Kadin Indonesia sendiri merupakan jenis keanggotaan yang terdiri dari Organisasi Pengusaha yang biasa dikenal dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis dan Organisasi Perusahaan yang biasa disebut sebagai Asosiasi atau Gabungan.



**DEWAN PENGURUS DAERAH
HIMPUNAN PENYELENGGARA PELATIHAN DAN KURSUS INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bidang Asosiasi dan Himpunan yang diwakili oleh Komite Tetap Keanggotaan ALB dan Pemberdayaan ALB melakukan kunjungan ke beberapa Kantor Sekretariat Asosiasi yang tengah menjalani proses Penerimaan ALB di Kadin Indonesia. Beberapa kunjungan tersebut dilakukan dalam tiga hari dengan rincian: Kunjungan kantor Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan Aliansi Konsultan Pengkaji Teknis Indonesia (ASKPEKTI) pada 21 Februari 2024, kunjungan kantor Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) dan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) pada 22 Februari 2024, dan kunjungan kantor Asosiasi Logistik Ekonomi Digital Indonesia (ALDEI) pada 23 Februari 2024.

Kunjungan ini merupakan langkah verifikasi untuk memastikan para calon ALB terbukti memiliki Kantor Sekretariat Asosiasi yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota. Namun, tidak hanya sebagai langkah administratif, kunjungan ini juga menjadi aksi nyata dalam membangun hubungan baik dan dua arah dengan para asosiasi dan himpunan yang akan menjadi bagian dari Kadin Indonesia.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia dan BNSP Kerja Sama Kembangkan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Dalam rangka melaksanakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kadin Indonesia bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional pada 5 Februari 2024.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, harmonisasi dan sinergi pengakuan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, pertukaran data dan/atau informasi pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, hingga pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.



Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam sambutannya menyatakan bahwa BNSP merupakan satu-satunya lembaga kenegaraan yang diamanatkan untuk mensertifikasi dan memberikan lisensi untuk peserta sertifikasi yang terstandarisasi dan berkualitas. Besar harapan kami agar kolaborasi ini dapat saling menguatkan satu sama lain antara Kadin Indonesia dan BNSP, dan dapat mencapai Indonesia Emas 2045 yang diinginkan.



Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Syamsi Hari, menyampaikan Sertifikat BNSP tidak hanya selembar kertas tetapi dalam proses penerbitannya terdapat usaha dengan hasil peserta yang kompeten. Sertifikasi ini juga tidak terbatas dalam sasarannya, siapapun bisa dan berhak mendapatkan sertifikat BNSP. BNSP juga siap berkolaborasi dengan para asesor. LSP juga diharapkan untuk menjaga mutu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz WH., mengungkapkan MoU yang ditandatangani ini merupakan tindak lanjut dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi terutama di lingkungan Kadin. Harapannya setelah terjalin kerja sama, dapat memberi penguatan di sektor lainnya untuk sekitar 200+ asosiasi tingkat nasional di bawah Kadin Indonesia.

Diharapkan dari nota kesepakatan bersama antara Kadin Indonesia dan BNSP ini dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja baik nasional maupun internasional baik di dalam negeri maupun luar negeri.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Strategi UMKM Go Digital Demi Kejar Target Indonesia Emas 2045

UMKM terbukti telah menjadi tulang punggung dalam fundamental perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penyerapan 97 persen tenaga kerja pada UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61 persen atau setara dengan Rp9.850 Triliun. Prospeknya pun sangat baik, dimana pemerintah melalui Kemenkop UKM telah menyatakan optimisme bahwa akan ada 30 juta UMKM yang telah terdigitalisasi pada tahun 2024. Saat ini, pada bulan Juni 2023, jumlah UMKM yang telah beralih ke digital mencapai 22,8 juta.



Sejalan dengan fakta penting tersebut, Kadin Indonesia selalu berupaya untuk membangun wirausaha nasional dan meningkatkan kapasitas UMKM. Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia, Aldi Haryoprato, hadir mendukung penguatan UMKM pada perekonomian nasional dalam segmen “Tech A Look” bersama CNBC Indonesia, dengan tema “Strategi UMKM Go Digital Demi Kejar Target Indonesia Emas 2045”.

Aldi menyampaikan bahwa Kadin Indonesia optimis terhadap target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta pada tahun 2024 ini. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta pelaku usaha serta pengguna internet yang mencapai hampir 80 persen dari total populasi, digitalisasi menjadi semakin penting bagi dunia usaha di Indonesia.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia senantiasa berupaya mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha seperti UMKM Naik Kelas. Untuk turut mendorong digitalisasi UMKM atau UMKM Naik Kelas, Kadin Indonesia berkomitmen dan berkontribusi nyata melalui program *inclusive-closed loop* “Wiki Wirausaha”.

(lanjutan di halaman 16)

Berikut adalah beberapa inisiatif Kadin Indonesia dalam upaya mendorong UMKM Naik Kelas:

- Kadin Indonesia melalui gerakan yang ada telah mengumpulkan 400+ UMKM Tergabung dalam Wiki Wirausaha
- Ada sekitar kurang lebih 33 mitra perusahaan yang telah bergabung sebagai mitra bagi UMKM dan industri terkait dalam Wiki Wirausaha
- Kadin Indonesia berhasil melakukan program kolaborasi WikiExport Jepang dengan Japan External Trade Organization (JETRO), PT HM Sampoerna Tbk., melalui program pemberdayaan UMKM Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) dan melaksanakan *business matching* di Tokyo untuk mendorong UMKM Indonesia untuk menembus pasar ekspor Jepang, serta merealisasikan temu bisnis UMKM Indonesia di Tokyo untuk membuka akses pasar mereka ke Jepang
- Layanan yang dihadirkan oleh Wiki Wirausaha mencakup kemitraan, pelatihan, dan ruang diskusi. Fokus utama dari program ini dan telah dilakukan beberapa kemitraan yaitu:

Engage dan Meta

Pelatihan UMKM untuk menggunakan platform sosial media untuk berjualan, pasang iklan

Aspire

Literasi finansial dan insentif bagi UMKM untuk digitalisasi finansial bisnis mereka

Jetro

Joint training and certification untuk UMKM melakukan ekspor ke Jepang

SME Support Japan

Business matching dengan UMKM manufaktur Jepang

Selain membahas mengenai strategi UMKM Go Digital yang mencakup tantangan serta dampak yang akan dirasakan oleh UMKM dalam konteks perputaran uang *e-commerce*, Aldi juga menyentuh aspek regulasi dan infrastruktur dalam konteks digitalisasi UMKM.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia Berikan Apresiasi dan Harapan Terkait Pemilihan Presiden 2024



Kadin Indonesia mengapresiasi terselenggaranya Pemilihan Presiden pada 14 Februari 2024 yang berjalan dengan lancar dan damai. Lebih lanjut, Kadin Indonesia meyakini bahwa hanya hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menentukan pemenang pemilu secara sah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, Juan P. Adoe, dalam program Consumer Report CNBC Indonesia TV pada 23 Februari 2024.

Sementara itu terkait pemerintahan yang baru, Kadin Indonesia berharap agar yang terpilih dapat memberikan dorongan positif terhadap konsumsi domestik dan mendorong kinerja ekspor, terutama dengan memfasilitasi pembukaan pasar baru di luar pasar tradisional sebagai tujuan ekspor yang baru. Selain itu, transisi kepemimpinan pada Capres dan Cawapres terpilih nanti berdasarkan keputusan KPU diharapkan dunia usaha dapat mendorong solusi dan inisiatif baru untuk menggeliatkan dunia usaha, daya beli masyarakat, konsumsi domestik, hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia Optimis Pemilu Genjot Bisnis dan Investasi di Indonesia



Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kondisi perekonomian nasional. Pemilu dapat menjadi sebuah tantangan dengan adanya pergantian kepemimpinan dan merupakan sebuah peluang yang memicu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dalam jangka panjang, dunia usaha mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya Pemilu yang damai. Hasil dari Pemilu berpotensi memengaruhi para pelaku usaha, khususnya dalam ekspansi bisnis dan investasi di Indonesia.

Pada 7 Februari 2024, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membagikan pandangannya dalam salah satu panelis dalam sesi diskusi panel Bloomberg TechnoZ Economic Outlook 2024. Forum diskusi ini mengusung tema “New Government: Political and Economic Directions after the Election” ini mempertemukan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti pembuat kebijakan, pelaku pasar, pebisnis, hingga analis dari berbagai perusahaan. Economic Outlook 2024 merupakan gelaran yang diinisiasi oleh media ekonomi dan bisnis, Bloomberg TechnoZ.

Dalam sesi tersebut, Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan Kadin Indonesia optimis namun tetap realistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai proyeksi kisaran di atas level 5 persen, 4,9-5,1 persen. Lebih lanjut, Yukki juga menyampaikan peran krusial Kadin Indonesia sebagai payung utama bagi dunia usaha dan industri di Indonesia. Terkait dengan Pemilu, Kadin Indonesia memandang Pemilu yang akan berlangsung 2024 mendatang dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana dalam jangka pendek pemilu turut mendorong peningkatan konsumsi domestik.

Kadin Indonesia mewakili para pelaku usaha di Indonesia berharap pelaksanaan pemilu dapat berlangsung damai sehingga memberikan jaminan kepastian bagi iklim usaha yang kondusif dan sehat. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian, Kadin Indonesia berharap lahir inisiatif yang turut mendorong geliat dunia usaha serta meningkatkan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat menjadi salah satu prioritas. Tidak terkecuali, dunia usaha juga turut mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya pemilu yang damai.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia Hadiri Investment Networking Luncheon BKPM



Kadin Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menyuarakan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi strategis di Asia-Pasifik. Komitmen ini salah satunya terwujud melalui hadirnya Kadin Indonesia dalam Investment Networking Luncheon yang diadakan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 15 Februari 2024.

Mewakili Kadin Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi, hadir dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Ketua Komite Tetap Pengembangan Iklim Usaha Investasi Kadin Indonesia dan Direktur Eksekutif Sekretariat Kadin Indonesia menghadiri pertemuan tersebut di The Hermitage Hotel, Jakarta.

Pertemuan ini mengusung tema "Indonesia Investment Focus 2024", dengan agenda utama sebagai forum yang memfasilitasi diskusi antara pihak kedutaan besar dengan mitra strategis dari negara-negara di Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Seluruh pihak berharap pertemuan tersebut dapat membangun sinergi global dan membuka peluang investasi baru serta memperkuat hubungan ekonomi antar negara guna mendukung visi Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ASEAN.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Bersama DJP Kemenkeu, Kadin Indonesia Terus Kawal Transformasi Digital dalam Kebijakan Perpajakan Core Tax System

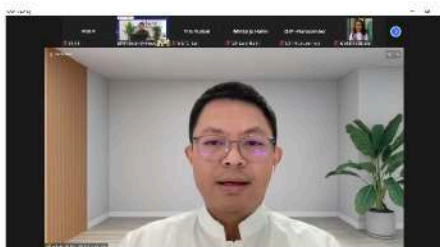
Kadin Indonesia melalui Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik menggandeng Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan “Sosialisasi Sistem Inti Perpajakan” pada 19-21 Februari 2024.



Core Tax System: Inovasi Menuju Reformasi Perpajakan

Core Tax System telah menjadi pusat perhatian dalam sosialisasi ini. Sebagai *super app*, aplikasi tersebut telah menjadi bagian integral dari reformasi perpajakan pasca diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadikan teknologi informasi dan basis data dalam menciptakan lanskap perpajakan yang lebih modern dan efisien sebagai fokus utama dalam reformasi ini.

Sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Aplikasi *super app* ini diharapkan dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan mempermudah keterlibatan pihak-pihak terkait dalam sistem perpajakan yang lebih terintegrasi.



Dihadiri sekitar 700 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, partisipasi anggota dalam kegiatan ini menunjukkan antusiasme terhadap perubahan positif dalam kebijakan perpajakan. Harapannya, implementasi Core Tax System dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di dalam dunia perpajakan Indonesia yang terus berkembang.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Gali Potensi Kerja Sama Bioekonomi: Kadin Indonesia Kunjungi Kolombia

Pengembangan potensi inovasi berbasis alam melalui ekonomi biru dan bioekonomi dinilai mampu mengatasi tantangan global, terutama perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kini tengah mendorong pengembangan keduanya agar memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi.



Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kadin Indonesia, yakni Ekonomi Biru yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.



Sebagai salah satu langkah konkret dukungan Kadin Indonesia terhadap program pemerintah, pada 17 Februari 2024, Kadin Indonesia Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama dengan Task Force Forest and Other Land Uses (FOLU), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Kementerian LHK, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) meluncurkan *roadshow* ke Bogotá D.C., Kolombia. Langkah ini diambil dalam upaya menjajaki potensi kerja sama bisnis bioekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Kolombia.

Dalam kunjungan kali ini, delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Kolombia, termasuk dengan Instituto Humboldt guna memahami lebih dalam tentang Strategi Bioekonomi. Selain itu, pertemuan juga diadakan dengan perwakilan dari Ministry of Science/Minambiente serta beberapa perusahaan pembeli produk kehutanan regeneratif yang telah mencapai kesuksesan.

Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah mengunjungi area hutan di Kolombia, yang diselenggarakan oleh Duta Besar (Dubes) RI untuk Kolombia, Antigua & Barbuda, Saint Kitts & Nevis, dan Barbados. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang praktik kehutanan di Kolombia dan membangun jaringan kolaborasi yang kuat.

Tindak lanjut dari kunjungan ini akan melibatkan sosialisasi hasil-hasil yang diperoleh kepada komunitas multi-usaha kehutanan regeneratif di Indonesia. Melalui langkah dan kerja sama ini, Kadin Indonesia berharap dapat membuka peluang lebih lanjut dan mendukung pengembangan kegiatan bioekonomi di Indonesia, sejalan dengan visi pemberdayaan sektor kehutanan regeneratif.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Dunia Usaha Ambil Langkah Proaktif dalam Menghadapi Tantangan Global melalui Satgas Ekspor Nasional



Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah proaktif dalam menghadapi dinamika pasar global dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ekspor Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi penurunan permintaan di pasar internasional.



Dalam rapat pleno Satgas Peningkatan Ekspor yang berlangsung pada 22 Februari 2024 lalu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, yang berperan sebagai Wakil Ketua I Satgas Ekspor Nasional bersama Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Juan Permata Adoe yang berperan sebagai Wakil Ketua III Satgas Ekspor Nasional, hadir sebagai bukti nyata keterlibatan sektor swasta dalam menyongsong peningkatan ekspor nasional.

Dalam pleno tersebut disoroti laporan Kelompok Kerja (Pokja) 1-5 yang membahas berbagai aspek krusial, antara lain:

- Pokja 1** Bidang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sumberdaya dan Industri Ekspor
- Pokja 2** Bidang Diplomasi Promosi dan Pengembangan Pasar Ekspor
- Pokja 3** Simplifikasi Sinkronisasi dan Integrasi Proses Bisnis dan Layanan Ekspor
- Pokja 4** Pembiayaan Ekspor
- Pokja 5** Peningkatan Ekspor UMKM

Langkah-langkah yang dihasilkan dari pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sumber daya dan industri ekspor Indonesia, serta menyelaraskan langkah dengan dinamika pasar global.



Dalam perannya sebagai Wakil Ketua I Satgas Ekspor Nasional, Shinta W. Kamdani menekankan pentingnya peningkatan produktivitas untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sementara itu, Juan Permata Adoe sebagai Wakil Ketua III Satgas Ekspor Nasional, menyoroti urgensi diplomasi promosi untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan visibilitas produk Indonesia di mata dunia.

Kadin Indonesia bersama pemerintah menyadari pentingnya upaya memperkuat daya saing sumber daya dan industri ekspor Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar global yang tidak terduga, menuju peningkatan ekspor yang maksimal.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia Eksplorasi Potensi Kerja Sama Indonesia-Mesir

Perdagangan antara Indonesia dan Mesir terus mengalami penguatan yang positif. Pada tahun 2022, volume perdagangan kedua negara mencapai angka sebesar USD 1,56 miliar.

Menyadari strategisnya hubungan perdagangan bilateral ini, Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menjaga hubungan antara Indonesia dan Mesir. Salah satu bukti konkret komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara Kadin Indonesia yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, dengan rekan-rekan media dari Mesir pada 16 Februari 2024. Media yang hadir diantaranya adalah Akhbar El-Youm Newspaper, Al-Ahram Newspaper, dan Egyptian Youth Council.

Ketiga media asal Mesir ini memiliki potensi pasar yang cukup besar, didukung oleh populasi Mesir di tahun 2022 yang mencapai 102,88 juta jiwa dengan tingkat melek huruf sebesar 74,5 persen, menurut data dari Statista. Akhbar El-Youm dan Al-Ahram merupakan surat kabar harian berbahasa Arab terkemuka di Mesir. Keduanya memiliki versi cetak dan *online* dengan jangkauan pembaca yang luas. Situs web Akhbar El-Youm rata-rata dikunjungi 1,5 juta pengguna per bulan, sedangkan Al-Ahram mencapai 2 juta pengguna per bulan. Sementara itu, Egyptian Youth Council berfokus pada segmen pembaca yang lebih muda, yaitu pemuda Mesir berusia 15-29 tahun. Dengan jumlah mencapai 25,5 juta jiwa, mereka memiliki potensi pasar yang cukup besar.

Pertemuan ini menggali lebih dalam perihal kerja sama ekonomi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua negara, serta menggali potensi serta peluang perdagangan yang ada antara Indonesia dan Mesir, dan langkah-langkah ke depan yang dapat ditempuh untuk menanamkan fondasi kerja sama yang lebih kuat dan saling menguntungkan di masa mendatang.

Dengan terus memperkuat sinergi antara Indonesia dan Mesir lewat media dan melalui dialog seperti ini, Kadin Indonesia berharap hubungan ekonomi kedua negara terus berkembang positif.



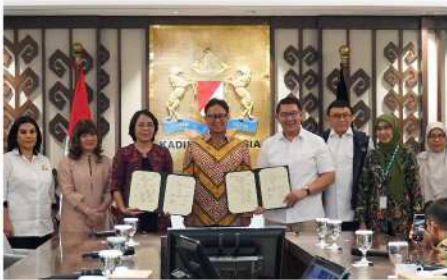
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Entaskan Stunting: Kadin Indonesia dan Kemenkes Teken Kerja Sama Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penurunan angka stunting sangat penting dalam mewujudkan resiliensi kesehatan sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.



Menurut Bank Dunia, pada tahun 2022 Indonesia tercatat memiliki tingkat stunting tertinggi ke-3 di ASEAN dan diperkirakan kehilangan 2-3 persen dari PDB per tahun akibat stunting. Sementara berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan dalam hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022.



Tingginya angka stunting di Indonesia mendorong Kadin Indonesia dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesehatan dan transformasi sistem kesehatan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Transformasi Sistem Kesehatan”, yang diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) “Sinergitas dan Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting”.

Baik Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem kesehatan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen Kadin Indonesia dalam peningkatan resiliensi kesehatan sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi dan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi. Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

(lanjutan di halaman 25)

Pelaksana Tugas Hariun Ketua Umum Kadin Indonesia menegaskan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. "Sesuai visi Indonesia Emas 2045, Kadin Indonesia menggarisbawahi bahwa penurunan angka stunting sangat penting di Indonesia, dan merupakan kunci pembangunan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia untuk jangka panjang," ujarnya.

Menteri Kesehatan mengapresiasi komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung peningkatan sistem kesehatan Masyarakat.

"Kesehatan menjadi komponen yang penting guna membantu Indonesia menjadi negara maju dan keluar dari jebakan middle income trap. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan ini salah satunya dimulai dari pengentasan stunting bagi anak-anak untuk mencetak generasi mendatang yang sehat dan cerdas. Dalam mewujudkan upaya ini, diperlukan kolaborasi yang inklusif, salah satunya melalui keterlibatan Kadin Indonesia,"
ujar Budi Gunadi

Lebih lanjut, Menkes berharap target penurunan stunting akan tercapai melalui kolaborasi ini. "Kami berharap MoU ini memperkuat sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha yang diwakilkan oleh Kadin Indonesia bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya," kata Budi Gunadi.



Ruang lingkup PKS antara Kadin Indonesia dengan Kemenkes di antaranya meliputi advokasi program dalam percepatan penurunan stunting, termasuk komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) serta sosialisasi program percepatan penurunan stunting, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada program percepatan penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting, dan penggalangan Gerakan Anak Sehat melalui program Bersama Entaskan Stunting (BERES).

Kerja sama ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan Pentahelix Model, yang melibatkan kolaborasi lima unsur, yaitu pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media dalam kegiatan aksi nyata gotong royong mempercepat penurunan stunting.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Kolaborasi Kadin Indonesia dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Permudah Pemberian Manfaat Pertumbuhan Usaha Mikro



Kadin Indonesia melalui Badan Ekonomi Syariah melakukan kolaborasi bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman pada 1 Februari 2024, dalam acara “Public Expose 2024, Bersama Wujudkan #ManfaatHebat”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Mewakili Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Taufan E. N. Rotorasiko, penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Sekretaris Badan Ekonomi Syariah Saiful Arifin, bersama dengan CEO Yayasan Rumah Zakat Indonesia H. Irvan Nugraha.

Kolaborasi ini merupakan program sosial dan ekonomi yang memungkinkan para pengusaha anggota Kadin Indonesia untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Penandatanganan MoU ini akan terealisasi salah satunya ke dalam dua program, yaitu Mustahik To Muzakki (M2M)-Lunas dan M2M-Scale Up. M2M-Lunas merupakan program bantuan untuk para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam membayar utang usahanya sedangkan, M2M-Scale Up merupakan program bantuan percepatan pertumbuhan usaha ultra mikro.

Semangat berbagi adalah suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku usaha, dimana Kadin Indonesia meyakini visi ini melalui kolaborasi bersama dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang telah memberdayakan jutaan masyarakat Indonesia melalui zakat, infaq, sedekah, dan berbagai dana kemanusiaan.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Kadin Indonesia Gandeng Osaka Chamber of Commerce and Industry Suntik Energi Baru pada Kerja Sama Ekonomi Jepang

Jepang telah menjadi mitra perdagangan dan investasi yang sangat signifikan bagi bisnis di Indonesia. Pada tahun 2022, nilai perdagangan antara kedua negara mencapai USD 42,03 miliar, sementara nilai investasi Jepang di Indonesia mencapai USD 3,6 miliar pada periode yang sama. Dengan pesatnya kemajuan di sektor industri, Jepang memegang reputasi yang kokoh dalam membangun kerja sama perdagangan yang erat, terutama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.



Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional bertemu dengan Presiden Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI), Luchi Setsuo dan hairperson OCCI, The Representative Director and Deputy Chair of Suntory Holdings, Ltd, Torii Shingo. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Kadin Indonesia dan OCCI melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menjadi dasar sinergi dalam mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis di ASEAN dan Jepang.



MoU yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia, Bernardino Vega, menjadi inisiatif regional yang dirancang untuk memperdalam kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang melalui penyelenggaraan *workshop*, seminar dan pertukaran informasi mengenai masing-masing pasar lokal kedua negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan keterlibatan Kadin Indonesia dalam ASEAN-Japan Business Promotion Platform: A Regional Initiative to Deepen ASEAN-Japan Economic Ties merupakan momentum positif bagi Indonesia di panggung internasional, dimana secara khusus sebagai upaya nyata Kadin Indonesia dalam membangun kerja sama ekonomi yang berkelanjutan, membuka pintu peluang baru, dan meneguhkan posisi Indonesia dalam arena bisnis global.



PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerja Sama Kadin Indonesia dan MUSIAD dalam Pemberdayaan Perempuan: Sinergi Bisnis dan Investasi

Pemberdayaan perempuan merupakan isu global yang memiliki dampak positif tidak hanya pada tingkat sosial, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Dalam Global Gender Gap Report tahun 2023, Indonesia saat ini masih berada di peringkat 87 dari 146 negara dengan skor 0,697. Ini berarti tingkat kesetaraan gender di Indonesia mencapai separuh lebih dari empat indikator penilaian. Skor Indonesia pada 2023 naik 0,001 dibandingkan tahun 2022 dalam laporan tersebut.

Sebagai induk organisasi dunia usaha, Kadin Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dengan menggerakkan inisiatif pemberdayaan perempuan di tingkat bisnis dan ekonomi, sejalan dengan tujuan global dan nasional untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.



Salah satu perwujudan komitmen tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin Indonesia yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia, Tri Hanurita, dengan Independent Industrialists and Businessmen Association (MUSIAD) yang diwakilkan oleh Head of Woman MUSIAD Indonesia, Nihal Yazici Aygun, sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia pada 19 Februari 2024.

Kerja sama ini tidak hanya mencakup pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan koneksi saja, namun juga melibatkan investasi secara strategis. Melalui sinergi ini, diharapkan pemberdayaan perempuan akan semakin merata dan membawa manfaat signifikan bagi Indonesia dan Turki.

Keberadaan MUSIAD memainkan peran penting dalam perekonomian Turki dengan menyumbang 25 persen ekspor, mempekerjakan 1,16 juta orang, dan memiliki 11.000 anggota pengusaha.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Kadin Indonesia dan SMRJ Berkomitmen untuk Peningkatan UMKM Indonesia dan Jepang



Kadin Indonesia terus berkomitmen terhadap kewirausahaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan mendorong pengembangan bisnis global dan kerja sama dengan berbagai mitra yang relevan. Salah satu bentuk konkret komitmen tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Kadin Indonesia dengan Small and Medium Enterprises and Regional Innovation Japan (SMRJ).

Pada 28 Februari 2024, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi, sebagai perwakilan Kadin Indonesia menandatangani MoU kerja sama dengan Small and Medium Enterprises and Regional Innovation Japan (SMRJ), yang diwakilkan oleh President of SMRJ, Yoshihiko Yamaji. Penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato bersama dengan para pengurus Bidang Kewirausahaan.

SMRJ merupakan lembaga nirlaba yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Didirikan pada tahun 1962, organisasi ini memiliki fokus mendukung usaha kecil dan menengah dalam mengatasi tantangan manajerial. Dengan sembilan kantor pusat regional yang tersebar di seluruh Jepang, SMRJ menyediakan dukungan yang tertarget dan disesuaikan dengan kebutuhan, melibatkan lebih dari 3.000 pakar di berbagai bidang.

Melalui perjanjian ini, kedua organisasi bertekad untuk lebih mendalam dan memperkuat hubungan bisnis antara Jepang dan Indonesia melalui kolaborasi yang luas dalam berbagai bidang. Ini mencakup pencocokan bisnis di sektor *start-up*, promosi ekspor, pengembangan produk baru melalui kerja sama antara perusahaan Jepang dan Indonesia, pencocokan bisnis untuk pendirian perusahaan patungan, misi bisnis, dan pertukaran saling.

Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan Indonesia & Japan Business Seminar. Para anggota UMKM Kadin Indonesia diundang untuk mengeksplorasi proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh SMRJ dan memahami bagaimana Kadin beserta anggotanya dapat turut berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut.

Seminar tersebut menjadi wadah untuk bertukar informasi, ide, dan potensi kolaborasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak. Kehadiran SMRJ membuka peluang baru untuk pengembangan usaha di Indonesia melalui kemitraan yang kuat dengan perusahaan Jepang, membawa dampak positif pada ekonomi dan pertumbuhan sektor UMKM di Tanah Air.

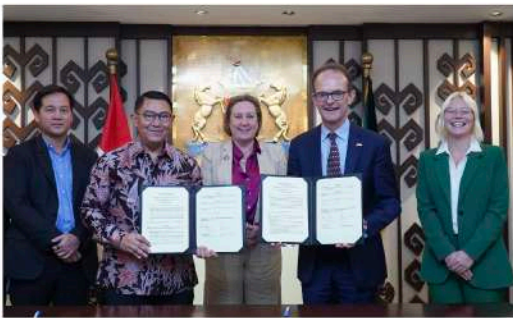


PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pembangunan IKN Nusantara: Kadin Indonesia dan Infrastructure Exports: United Kingdom Gagasan Kolaborasi untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045



Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun dengan identitas nasional untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia, mencapai target Indonesia sebagai negara maju. Dalam proses pembangunan IKN, Kadin Indonesia memainkan peran penting dalam memfasilitasi pencarian investor di IKN Nusantara.



Keterlibatan investasi swasta sangat penting untuk mendukung semangat redistribusi ekonomi antar wilayah di Indonesia, sehingga tercipta pemerataan serta melahirkan potensi pasar yang semakin luas. Menyadari pentingnya peran pihak swasta dan dunia usaha, pada 29 Februari 2024, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Infrastructure Exports: United Kingdom.

Penandatanganan juga melibatkan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, dan disaksikan langsung oleh Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, The Rt Hon Anne-Marie Belinda Trevelyan.

Kerja sama mencakup berbagai aspek, seperti desain dan perencanaan, mobilitas berkelanjutan, fasilitasi pembiayaan yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap manajemen proyek, tata kelola, dan standar.

Kadin Indonesia berharap kolaborasi ini akan membawa dampak positif tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di sekitar IKN.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Terima Lawatan Dubes Yordania: Perkuat Kemitraan Ekonomi Yordania dan ASEAN



Kawasan ASEAN memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Pada tahun 2022, total nilai produk domestik bruto (PDB) ASEAN tercatat mencapai USD 3,6 triliun atau sekitar Rp 54.907 triliun. Adanya potensi ini perlu dioptimalisasi melalui penguatan kerja sama perdagangan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di ASEAN, Indonesia terus terbuka mendorong terjalinnya kemitraan ekonomi antara ASEAN dan Indonesia dengan negara-negara non-tradisional sebagai tujuan pasar baru.

Pada 6 Februari 2024 lalu, Kadin Indonesia turut memfasilitasi keterbukaan ini dengan menerima kunjungan dari Duta Besar Yordania. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Bernardino Vega, menerima langsung kunjungan Duta Besar Yordania untuk Indonesia, H.E. Mohammad Al-Sarheed.

Pertemuan tersebut fokus membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Yordania dan negara-negara ASEAN agar dapat memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi antar negara. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Yordania, total perdagangan antara Yordania dan ASEAN pada tahun 2023 mencapai USD 1,2 miliar dengan nilai investasi Yordania di ASEAN senilai USD 100 juta pada tahun 2023.



Bersamaan dengan momen pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi global ke kawasan Asia-Pasifik, pertemuan ini diharapkan dapat menginisiasi kerja sama strategis dengan Yordania sebagai mitra dagang non-tradisional Indonesia dan ASEAN. Sebagai langkah jangka panjang, Kadin Indonesia berencana melakukan penilaian mendalam terhadap potensi ekonomi di Timur Tengah, termasuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania dalam beberapa tahun mendatang.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Kadin Indonesia Suarakan Aspirasi Asosiasi Sektor Terdampak Terkait Larangan Terbatas Impor



Tanggapan Resmi Kadin Indonesia Jelang Implementasi Permendag No. 36/2023

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri yang menjadi landasan terbitnya Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Meskipun demikian, untuk memastikan aspirasi para pelaku usaha dapat diakomodasi dalam tata aturan regulasi pemerintah, Kadin Indonesia menjalankan fungsi advokasi dengan menerima masukan dari asosiasi sektoral terdampak dan menyampaikan pandangan terkait rencana implementasi peraturan tersebut, serta implikasinya terhadap keberlanjutan proses produksi di industri dalam negeri. Lebih lanjut, Kadin Indonesia juga menghimbau agar sistem elektronik dan peraturan pendukung terkait sudah siap 3-6 bulan sebelum pelaksanaan peraturan, termasuk penambahan *grace period* setelah sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* untuk menjamin kestabilan rantai pasok dan keberlanjutan proses produksi dalam negeri.

Jelang implementasi peraturan tersebut, Kadin Indonesia menemukan adanya keterbatasan kapasitas industri hulu domestik sehingga diperlukan adanya evaluasi terhadap HS Code untuk mempermudah importasi bahan baku dan bahan penolong. Tanggapan resmi Kadin Indonesia mengenai Permendag No. 36 Tahun 2023 ini juga telah mendapatkan perhatian publik melalui pemberitaan media yang luas dan komprehensif.

(lanjutan di halaman 33)

Kadin Indonesia Bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dorong Advokasi Kebijakan Permendag No. 36/2023

Untuk itu, setelah menerima berbagai masukan dari asosiasi sektoral terdampak, Kadin Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Citra menyampaikan masukan pelaku usaha terkait rencana implementasi peraturan tersebut pada 13 Februari 2024 dalam Rapat Pembahasan Permendag No. 36/2023. Rapat dihadiri oleh Deputy V Perdagangan dan Industri Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, sebagai perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.



Akses Press Statement Kadin mengenai Permendag No. 36 Tahun 2023 dengan scan kode QR di samping atau melalui tautan berikut: tinyurl.com/pressstatementkadin

Dalam kesempatan tersebut, Kadin Indonesia menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran dari berbagai asosiasi pengusaha terkait dampak yang mungkin timbul dari Permendag No. 36/2023 terhadap industri hilir. Beberapa asosiasi mengutarakan keprihatinan terkait kemungkinan peningkatan biaya produksi dan dampaknya terhadap daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami secara menyeluruh dampak positif dan negatif dari pembaruan ini.

Menanggapi aspirasi dan kekhawatiran tersebut, Kementerian Perdagangan mengusulkan untuk mengadakan rapat koordinasi di tingkat menteri. Rapat ini diharapkan dapat menjadi forum untuk meninjau ulang secara menyeluruh implementasi Permendag No. 36. Dalam rapat koordinasi nanti, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, memastikan kelancaran operasional industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



ADVOKASI KEBIJAKAN

Indonesia Adakan Webinar Advokasi Dampak Penerapan PP 58 dan PMK 168



Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168).

Regulasi yang tertuang dalam PP 58 dan PMK 168 dirancang untuk mensimplifikasikan cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tabel Tarif Efektif (TER) untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.

Terus menjalankan fungsi advokasi kepada para anggotanya, Kadin Indonesia melalui Pengurus Bidang Hukum dan HAM menyelenggarakan sosialisasi kedua peraturan tersebut dengan tema “Dampak Penerapan PP 58 dan PMK 168 Terhadap Pelaku Usaha Pemberi Kerja dan Karyawan” pada 21 Februari 2024. Sosialisasi ini dibalut dalam gelaran *webinar* advokasi yang melibatkan total 206 peserta dengan narasumber perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan perwakilan Deloitte Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Harjono membuka secara resmi sosialisasi ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan dampak dari penerapan peraturan ini terhadap dunia usaha.





SPECIAL SECTION: RAPAT DEWAN PENGURUS HARIAN

Rumuskan Program Strategis Sepanjang Tahun 2024, Kadin Indonesia Adakan Rapat Pengurus Harian

Guna merumuskan program-program unggulan sepanjang tahun 2024, Kadin Indonesia menginisiasi rapat perdana Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia pada 7 Februari 2024 bertepatan di Menara Kadin.



Dalam rapat ini, masing-masing pengurus Kadin Indonesia menjabarkan program inovatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto menghadiri rapat tersebut dan turut dihadiri pula oleh seluruh pengurus harian Kadin Indonesia.



Rapat perdana tersebut juga menekankan kembali kinerja Kadin Indonesia yang senantiasa berprinsip pada rasa optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, rapat tersebut juga sekaligus menyepakati beberapa tinjauan ekonomi makro yang mencakup beberapa poin, seperti target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh di kisaran 4,9-5,1 persen, hingga target realisasi investasi sebesar Rp 1.650 Triliun pada tahun 2024.



Untuk informasi lebih lengkap mengenai **Tinjauan Ekonomi** silakan unduh dokumen berikut

SPECIAL SECTION: RAPAT DEWAN PENGURUS HARIAN

Rapat Pengurus Berbagai Bidang, Menyambut Implementasi Program Tahun 2024

Mengawali tahun 2024, bidang di Kadin Indonesia melaksanakan rapat pengurus bidang perdana (*kick off meeting*) bersama jajaran pengurus masing-masing guna merumuskan program kerja yang inovatif dan tepat sasaran dalam upaya untuk mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045

Rapat Perdana Bidang Investasi 2024: Optimis Capai Target Investasi 2024

Bidang Investasi Kadin Indonesia memulai upaya strategis dalam penerapan program kerja 2024 melalui pelaksanaan *Kick Off Meeting* pada 7 Februari 2024. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Tony Wenas, serta para pengurus Bidang Investasi. Pertemuan tersebut membahas upaya menggali potensi kolaborasi dengan BKPM/ Kementerian Investasi dalam rangka mencapai target investasi di tahun 2024 sebesar Rp 1,650 triliun. Bidang Investasi akan melaksanakan program kerja yang sudah disampaikan pada gelaran Rapimnas Kadin 2023 dengan penambahan sinergi program Bidang Investasi dan Bidang Hubungan Internasional berupa kunjungan ke beberapa acara dan negara.



Secara lebih spesifik, beberapa program inovatif yang akan dilaksanakan oleh Bidang Investasi meliputi, pengoptimalan OSS, Morning Coffee dengan BKPM, Pembangunan Ekonomi Daerah, Global Investment Forum, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bidang Investasi akan membuat narasi tunggal Bidang Investasi untuk menyamakan suara Bidang Investasi pada berbagai program kolaborasi dan akan menjadi bahan yang akan disampaikan kepada pemerintahan baru sebagai pernyataan resmi dari Bidang Investasi Kadin Indonesia.

(lanjutan di halaman 37)





Kick Off Meeting Badan Ekonomi dan Keuangan Digital

Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital juga turut melaksanakan *kick off meeting* yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital, Pandu P. Sjahrir, dan dihadiri pengurus bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Kadin Indonesia pada 7 Februari 2024.



Kick off meeting ini membahas beberapa pokok diskusi yang mencakup, usulan Badan Ekonomi dan Keuangan Digital yang akan memfasilitasi rencana *review* atas *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, rencana pengembangan *governance code* untuk UMKM, hingga pembahasan mengenai isu pajak (PPN) pada aset kripto yang memerlukan mediasi dari Kadin kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai langkah ke depan, Bidang Ekonomi dan Keuangan Digital akan memperdalam fokus program guna mengawal *good governance* untuk sektor keuangan dan digital melalui pengadaan diskusi dengan pemerintah di tingkat senior dan memperkuat edukasi serta publikasi atas nama Kadin Indonesia melalui kolaborasi strategis bersama OJK dan lembaga lainnya.

(lanjutan di halaman 38)

Badan Pengemebangan UMKM dan Koperasi Inisiasi Rapat Perdana untuk Tingkatkan Kapasitas UMKM

Kadin Indonesia secara konsisten terus berkomitmen untuk melakukan penguatan dan mendukung upaya UMKM untuk naik kelas. Komitmen ini salah satunya terwujud melalui dibentuknya Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi yang dikepalai oleh R. M. Tedy Aliudin.

Pada 1 Februari 2024, Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi mengadakan rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi, Tedy Aliudin, dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin, Yukki Nugrahawan Hanafi.



Pertemuan Perdana Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi ini membahas salah satu agenda utama, yaitu rencana pengembangan UMKM di Indonesia melalui perumusan beberapa program unggulan. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin menyampaikan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia, dimana 97 persen tenaga kerja dan lebih dari 61 persen PDB berasal dari sektor UMKM. "Oleh karena itu, Kadin Indonesia perlu fokus pada upaya pembinaan dan pengembangan UMKM agar naik kelas," ujar Yukki.

Usai pertemuan ini telah dirumuskan lima program unggulan Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi yang meliputi, Kampung Digital Kadin Indonesia, Film UMKM, Digital Marketing Management, Motivator Bisnis, hingga One Product One Brand.



SPECIAL SECTION: POSISI PENGUSAHA TERHADAP QUICK COUNT PEMILU

Pemilu 2024: Kadin Indonesia Memandang dengan Optimisme Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi

Seusai pemilu yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024, Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua pihak terlibat, termasuk KPU, Bawaslu, petugas KPPS, TNI, dan Polri atas kontribusi serta partisipasi dalam menjaga kelancaran kontestasi pemilu dengan damai.

Kadin Indonesia mengakui hasil *quick count* dari berbagai lembaga survei dan akan menunggu hasil resmi dari KPU pada 20 Maret 2024. Oleh karena itu, Kadin Indonesia mengimbau masyarakat untuk menghormati proses pemilihan umum, menunggu hasil resmi KPU, serta menjaga keamanan dan kondusifitas dengan saling merangkul dalam persaudaraan.

Kadin meyakini bahwa kontestasi pemilu adalah manifestasi dari proses demokrasi yang sehat. Maka itu, mari tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan pemilu dengan matang dan bertanggung jawab.

Sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat dunia usaha, termasuk mengenai hasil *quick count* Pemilu 2024 melalui sejumlah wawancara dengan media pada 15 Februari 2024.

Berikut adalah rekap kegiatan wawancara yang dilakukan secara terpisah di tiga program saluran televisi utama nasional.

Program “Bisnis dan Referensi” - CNN Indonesia

Kadin memberikan apresiasi dari upaya dan kredibilitas lembaga survei dalam memberikan gambaran awal dari hasil Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam program Bisnis dan Referensi yang ditayangkan CNN Indonesia.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia mengimbau agar seluruh masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Lebih lanjut, Yukki mengimbau agar semua pihak menjaga situasi kondusif dan aman, serta saling merangkul dalam semangat persaudaraan.

(lanjutan di halaman 40)

Kadin Indonesia percaya bahwa kontestasi dalam pemilu, baik itu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, maupun DPRD, adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dalam kondisi apapun, Kadin yakin Indonesia mampu melaksanakan pemilu dengan matang dan bertanggung jawab.



CNN Indonesia adalah platform televisi berita digital yang dapat diakses dengan penyiaran dalam Bahasa Indonesia. Saluran berita ini menyajikan beragam konten lokal dan internasional, meliputi berita umum, perkembangan bisnis, dunia olahraga, perkembangan teknologi, dan hiburan. Dengan jangkauan lebih dari 10 juta audiens, CNN Indonesia memastikan penyebaran informasi yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Program “Profit” - CNBC Indonesia

Di hari yang sama, Yukki kembali berpartisipasi dalam wawancara media pada program Profit di CNBC Indonesia. Kali ini, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia hadir sebagai narasumber bersama dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani.

Pada kesempatan ini, Yukki menegaskan pentingnya menunggu hasil resmi dari KPU sebagai langkah penting dalam demokrasi, serta mengapresiasi berbagai pihak yang telah ikut menyelenggarakan pemilu dengan damai dan aman.

Sebagai informasi tambahan, CNBC Indonesia merupakan salah satu media massa strategis yang menjangkau 21 provinsi di Indonesia, menjadikannya saluran berita ekonomi dan bisnis yang sangat berpengaruh. Keberadaan CNBC Indonesia menjadi sangat penting dalam menyediakan informasi finansial, bisnis, dan ekonomi terkini bagi masyarakat. Dengan cakupan yang luas, CNBC Indonesia memberikan pemirsa akses langsung ke berbagai berita ekonomi global dan nasional, serta analisis mendalam tentang perkembangan pasar keuangan.

(lanjutan di halaman 41)



Program “Investor Daily Talk” - IDTV

Di lain kesempatan, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, dalam program Investor Daily Talk di IDTV menyoroti optimisme pelaku usaha Indonesia terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Sarman juga menyebutkan bahwa pemilu yang berjalan aman dan damai akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia.



Melalui serangkaian wawancara dengan beberapa media, Kadin Indonesia menggunakan kesempatan sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dunia usaha dalam menegaskan komitmen dalam mendukung proses demokrasi yang berlangsung dengan baik. Kadin Indonesia bersama dengan para pelaku usaha siap untuk terus berkontribusi dengan harapan akan hasil pemilu yang adil dan transparan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Dengan cakupan yang luas, Investor Daily TV memberikan akses langsung kepada informasi pasar keuangan, analisis, dan tren investasi terkini kepada para pelaku bisnis, investor, serta masyarakat yang tertarik pada dunia keuangan. Dengan *reach* yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pebisnis, profesional keuangan, dan masyarakat umum, Investor Daily TV memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman dan keputusan finansial mereka.



Opini Pengurus Kadin Indonesia



R.M. Tedy Aliudin

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN UMKM & KOPERASI
KADIN INDONESIA

Indonesia Butuh 122 Ribu Pelaku Usaha Besar di Tahun 2045 “Transformasi UMKM Menuju Indonesia Emas 2045”

Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045, bahkan menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Rata-rata negara maju, memiliki 0,1-0,4 persen pelaku usaha besar dari total pelaku usaha yang ada. Berikut data beberapa negara maju dengan jumlah pelaku usahanya:

	UMKM	USAHA BESAR	KONTRIBUSI TENAGA KERJA	KONTRIBUSI PDB
Austria	99.60%	0.40%	63.50%	55.20%
Belanda	99.90%	0.10%	63.80%	61.40%
Belgia	99.90%	0.10%	66.30%	59.00%
Denmark	99.70%	0.30%	64.40%	62.40%
Finlandia	99.70%	0.30%	62.90%	57.80%
Prancis	99.80%	0.20%	51.70%	42.10%
Jerman	99.60%	0.40%	57.40%	46.60%
Irlandia	99.70%	0.30%	66.90%	31.60%
Italia	99.90%	0.10%	75.70%	62.90%
Latvia	99.80%	0.20%	78.10%	70.50%
Lithuania	99.80%	0.20%	73.60%	64.80%
Amerika Serikat	99.99%	0.10%	46.40%	44.00%
Australia	99.80%	0.20%	54.00%	66.00%
Rata-rata	99.78%	0.22%	63.44%	55.72%

Sumber: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/54976>

Kondisi pelaku usaha Indonesia dengan total saat ini 64,2 juta, dimana 99,99 persen adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan hanya 0,01 persen pelaku usaha besar. Kondisi ini telah berlangsung dalam kurun waktu 27 tahun terakhir, sejak adanya data pelaku UMKM.

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun berbagai upaya dilakukan untuk pengembangan UMKM, namun dalam perjalanannya, belum ada perkembangan signifikan terhadap UMKM itu sendiri.

Dengan asumsi pertumbuhan pelaku usaha Indonesia rata-rata 2,43 persen diprediksi bahwa pada tahun 2045 nanti, akan ada 122 juta pelaku usaha Indonesia, yang saat ini hanya 64,2 juta. Apabila melihat negara maju, dimana minimal 0,1 persen nya adalah pelaku usaha besar, maka setidaknya Indonesia harus memiliki 122 ribu pelaku usaha besar pada tahun 2045, dimana kondisi saat ini hanya ada 5.550 pelaku usaha besar.

(lanjutan di halaman 43)

Bila dalam kondisi normal, maka pada tahun 2045 akan ada kurang dari 13 ribu pelaku usaha besar di Indonesia, yang berarti cukup jauh jarak yang terjadi jumlah pelaku usaha besar dengan negara maju lainnya.

Indonesia butuh banyak pelaku UMKM yang Naik Kelas menjadi Usaha Besar, agar keseimbangan prediksi sebagai salah satu negara maju juga dapat diwujudkan dalam pemenuhan rasio pelaku usahanya.

Dibutuhkan kerja yang luar biasa agar rasio usaha besar dapat terwujud di tahun 2045, dimana Indonesia butuh 122 ribu pelaku usaha besar. Perlu dipersiapkan dari saat ini pengembangan UMKM berkesinambungan dengan target Naik Kelas di masing-masing klasifikasi, dimana ada lebih dari 44,7 ribu pelaku Usaha Menengah dan 194 ribu pelaku Usaha Kecil yang memiliki peluang untuk Naik Kelas menjadi pelaku Usaha Besar, dengan jumlah sesuai target, apabila dilakukan pembinaan secara baik.

Di antara negara-negara di Asia Tenggara pun, rasio jumlah pelaku UMKM terhadap total pelaku usaha pun tertinggi seperti data sebagai berikut:

	JUMLAH UMKM	%
Brunei Darussalam	5,876	97.20
Cambodia	512,870	99.80
Indonesia	64,194,057	99.99
Laos	124,567	99.80
Malaysia	907,065	98.50
Myanmar	75,116	89.90
Philippines	998,342	99.50
Singapore	271,800	99.50
Thailand	3,077,822	99.80
Vietnam	593,629	97.20

Ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM diantara negara-negara Asia Tenggara pun, Indonesia masih tertinggi.

Dibutuhkan Kementerian, Lembaga, atau Komite yang fokus, mengakomodasi lintas sektor Kementerian atau Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah, agar pembinaan dan pengembangan UMKM di masa depan lebih berkelanjutan, dan dapat menciptakan UMKM yang Naik Kelas ke Usaha Besar lebih banyak lagi, dengan juga melibatkan Organisasi yang membina UMKM.

Pola Kemitraan antara UMKM dengan pelaku Usaha Besar yang ada, bisa jadi menjadi salah satu solusi. Misalkan saja ada 5.550 pelaku Usaha Besar, membina dan mengembangkan pola kemitraan masing-masing 10 pelaku Usaha Menengah agar Naik Kelas menjadi Usaha Besar, maka setidaknya akan ada 44,7 ribu Usaha Menengah yang ada saat ini dapat Naik Kelas ke Usaha Besar. Begitu juga Pola kemitraan dengan Usaha Kecil dan lain-lain.

Keterlibatkan perangkat Kelurahan atau Desa paling bawah yaitu ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai salah satu solusi tenaga pembina atau pendamping UMKM, karena para Ketua RT lah yang paling tahu kondisi di lingkungannya. Hal ini untuk menyikapi kekurangan tenaga pendamping UMKM yang ada saat ini, yang tentu para ketua RT diberikan berbagai Kompetensi tentang UMKM.

Dibutuhkan pendekatan kolaboratif inklusif dari semua pihak secara berkelanjutan, agar pengembangan UMKM ke depan lebih baik lagi.

MANFAAT

Keanggotaan Kadin

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjugi **anggota.kadin.id**



1 Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan



2 Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**



3 Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**



4 Masuk dengan akun yang didaftarkan



5 Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab



6 Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran



7 Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice



8 Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



9 Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjugi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

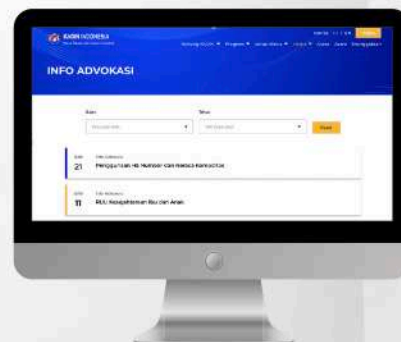
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

KABAR TERKINI

Pemberian Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik Diperkenalkan

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Menteri Perindustrian (“Minister”) telah menerbitkan berbagai regulasi yang khusus mengatur tata cara pertimbangan teknis (“Pertimbangan”) impor produk tertentu. Salah satu kerangka regulasi tersebut adalah Peraturan No. 6 Tahun 2024 (“Permenperin 6/2024”), yang mengatur tata cara yang berlaku untuk penerbitan Pertimbangan impor produk elektronik. Permenperin 6/2024 telah berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Kerangka terbaru ini mengatur sejumlah 78 produk elektronik beserta kode pos tarif/ harmonized system-nya, yang secara komprehensif tercantum dalam Lampiran Permenperin 6/2024. Impor produk-produk elektronik ini memerlukan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.^[1] Untuk dapat memperoleh persetujuan impor, Pertimbangan harus dimiliki terlebih dahulu melalui pengajuan permohonan sebelumnya oleh pemilik Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”) dan Angka Pengenal Importir – Produsen (“API-P”).^[2]

Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesian Legal Brief edisi kali ini merangkum berbagai persyaratan dan tata cara yang harus diikuti oleh pemilik API-U dan API-P untuk dapat memperoleh Pertimbangan. Analisis kami dibagi sebaga berikut:

1. Persyaratan Pemilik API-U dan API-P; dan
2. Pengajuan Permohonan dan Perubahan Pertimbangan

Persyaratan Pemilik API-U dan API-P

Sebelum pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan, persyaratan tertentu harus dipenuhi oleh pemilik API-U dan API-P, yang diringkas dalam tabel di bawah ini:^[3]

Persyaratan	Pemilik	
	API-P	API-U
Harus telah memenuhi komitmen perizinan berusaha	✓	✓
Harus telah terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (“SIINas”)	✓	✓
*Wajib telah menyampaikan data industri melalui SIINas (bagi perusahaan industri)	✓	
Wajib telah menyampaikan data industri di tahap pembangunan (bagi perusahaan industri yang masih dalam tahap pembangunan)	✓	
Harus telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya (bagi perusahaan non industri)	✓	
Harus telah menyampaikan laporan realisasi distribusi produk elektronik tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus		✓

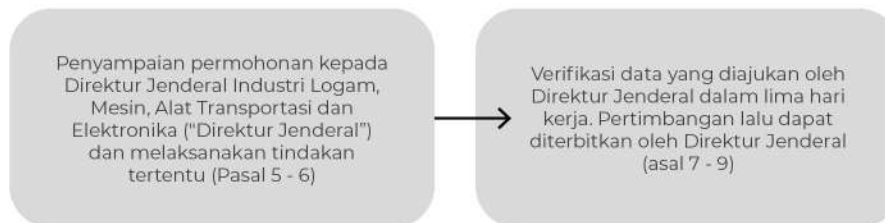
(lanjutan di halaman 48)

[1] Pasal 2 dan Lampiran I, Permenperin 6/2024. | [2] Pasal 3, Permenperin 6/2024. | [3] Pasal 4 (1 - 2), Permenperin 6/2024.

Persyaratan **yang ditandai dengan tanda bintang** di atas tidak berlaku bagi perusahaan industri yang belum memasuki periode penyampaian data industri.^[4]

Pengajuan Permohonan dan Perubahan Pertimbangan

Bagian berikut akan mendiskusikan seluruh tata cara untuk memperoleh Pertimbangan (bagi pemilik API-P atau API-U yang belum memiliki Pertimbangan) dan untuk Pertimbangan yang diubah (bagi pemilik API-P atau API-U yang telah memiliki Pertimbangan) ["Pertimbangan Perubahan"]. Tata cara ini diilustrasikan pada diagram alir di bawah ini:



Pertimbangan hanya dapat diterbitkan setahun sekali dan **akan berlaku selama satu tahun sejak penerbitannya**. Selain itu, pemilik API-U/API-P yang relevan dapat mengajukan permohonan Pertimbangan untuk tahun berikutnya pada tahun berjalan.^[5]

Seperti yang disebutkan secara singkat di atas, pemilik API-U/API-P yang telah memperoleh Pertimbangan pada tahun berjalan dapat mengubah Pertimbangan-nya dalam hal perubahan dilakukan untuk data yang relevan (misalnya identitas pemilik API-U/API-P, kode pos tarif/harmonized system, uraian barang, dll.)^[6] dan/atau alokasi impor. Pertimbangan Perubahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertimbangan yang diterbitkan sebelumnya.^[7]

Pengajuan permohonan Pertimbangan dan Pertimbangan Perubahan mengamanatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu harus dilakukan, yang diringkas dalam tabel di bawah ini:^[8]

Tindakan 1: Pengisian Dokumen Tertentu

Data yang Perlu Diisi	API-P		API-U	
	Baru	Perubahan	Baru	Perubahan
Rencana produksi	✓		✓	
Rencana impor	✓	✓	✓	✓
Realisasi impor tahun sebelumnya	✓	✓	✓	✓
Data laporan produksi dan kebutuhan bahan baku tahun sebelumnya sesuai isian SIINas	✓			
Rencana distribusi			✓	

(lanjutan di halaman 49)

Tindakan 2: Mengunggah Dokumen Tertentu

Dokumen yang Perlu Diunggah	API-P		API-U	
	Baru	Perubahan	Baru	Perubahan
Perizinan berusaha yang diperlukan	✓	✓	✓	✓
Kerja sama keagenan atau distributor dengan pemegang merk, untuk barang yang tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong			✓	✓
Kontrak kerja sama atau penjualan dengan mitra yang menentukan jenis barang tertentu, untuk barang yang digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong			✓	✓
Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang, termasuk gambar pendukung yang relevan.	✓	✓	✓	✓
Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data dan/atau informasi terkait barang adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓	✓	✓	✓
Persetujuan Impor		✓		✓
Penjelasan teknis perubahan data dan/atau alokasi impor		✓		✓
Matriks perubahan serta data dukungannya		✓		✓

Terakhir, perlu dicatat bahwa pemilik API-P/API-U yang telah memiliki Pertimbangan dan/atau Pertimbangan Perubahan wajib menggunakan dan/atau mendistribusikan barang yang diimpor berdasarkan peruntukannya,^[9] jika tidak, pemilik tersebut akan dikenai jenis-jenis sanksi administratif berikut:^[10]

1. Penolakan permohonan Pertimbangan untuk tahun berikutnya; dan
2. Rekomendasi pencabutan persetujuan impor yang akan diterbitkan kepada Menteri Perdagangan.

[9] Pasal 18, Permenperin 6/2024. | [10] Pasal 23, Permenperin 6/2024.



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.



SCAN ME

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirausaha.id

Daftar ke:

wikiwirausaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



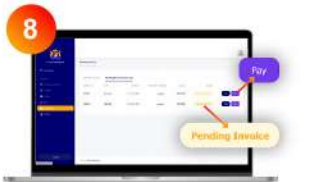
Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Help desk:

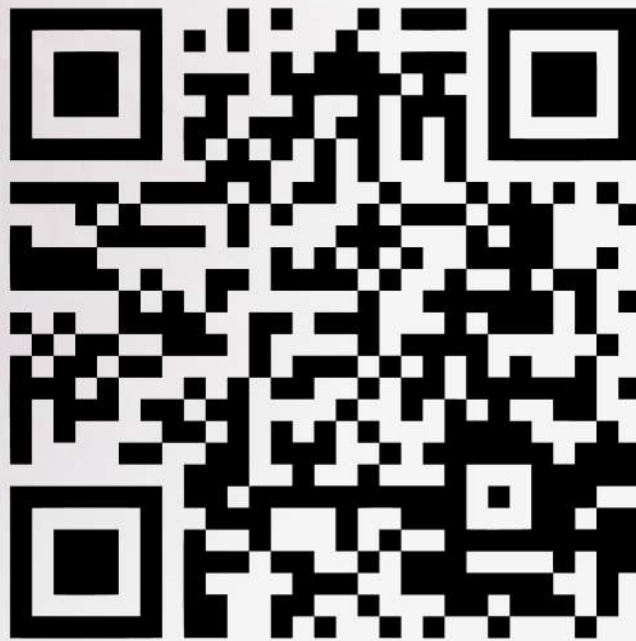
☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)



SCAN QR
ATAU KUNJUNGI
edocs.kadin.id/



Mari menjadi bagian dari **ekosistem bisnis Indonesia** dengan bergabung Kadin Indonesia



tinyurl.com/pendaftarananggotakadin



**Urgensi untuk melakukan
pengkinian data bagi pengurus
Kadin Indonesia**

Silahkan cek **WhatsApp Hotline
(0895-6113-40500)** atau **Email** Bapak/Ibu
Pengurus, Segera Akses Link untuk Lakukan
Pengkinian Data



Program-Program Kadin Indonesia Telah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jadilah Bagian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai **Sponsor Kadin Indonesia**



Kegiatan Utama Kadin Indonesia 2024



**Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia**
17 Agustus



**Hari Ulang Tahun
Kadin Indonesia**
24 September



**Rapimnas
Kadin Indonesia**
Q4 2024



**Kadin Impact Award
Sepanjang Tahun**
2024



**Quarterly Regulatory
Outlook 2024**



**Quarterly Policy
Outlook 2024**

Informasi lanjutan tentang kerja sama dan
kolaborasi dapat menghubungi

Felia (+62 813 8801 2200)

Terbangkan Potensi Ekonomi Bersama, Mencapai Visi Indonesia Emas 2045!



Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia berkolaborasi untuk memberikan **kemudahan** dan **kenyamanan** bagi seluruh anggota Kadin Indonesia, dalam melakukan **perjalanan udara** di dalam maupun luar negeri

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Kadin Indonesia

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Internasional

POTONGAN HARGA

3%

Rute Domestik

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Middle East

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Interline

Kemudahan lain yang dapat dimiliki Anggota Kadin Indonesia



Memiliki ekstra bagasi
hingga **5 kilogram**



Mendapatkan kemudahan
program MICE jika bepergian
dalam kapasitas 100 orang



Memiliki **akses check-in**
pada **counter khusus**



Mendapatkan **staf sales khusus**



Segera daftarkan dirimu menjadi
Anggota Kadin Indonesia dan nikmati
manfaat untuk melakukan perjalanan bersama

Garuda Indonesia

Nikmati Benefit Eksklusif sebagai Anggota Kadin Indonesia bersama Hyundai!

Optimalkan mobilitas bisnis Anda dengan **potongan** harga istimewa dari Kadin Indonesia x Hyundai hingga **50 juta rupiah***



IONIQ 5



IONIQ 6

Mobil Listrik



Santa Fe



Stargazer



Creta



Palisade



Staria

Mobil Non-Listrik

Tata cara pembelian:

1. Hubungi nomor Kadin Indonesia yang tertera untuk melakukan verifikasi anggota aktif Kadin Indonesia yang telah memiliki KTA-B
2. Setelah melakukan verifikasi, pihak Hyundai Indonesia akan segera menghubungi Anda untuk melanjutkan proses transaksi

* Potongan harga berbeda-beda untuk masing-masing jenis mobil

Informasi lebih lanjut hubungi:

+62 813-8801-2200
(Kadin Indonesia)



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRUSAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirusaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan **kapasitas** dan kesempatan meningkatkan **jenjang karir** di sini:

kadinfornaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id